

Cianjur Daerah Rawan Bencana Geologi

CIANJUR (IM)- Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merupakan salah satu daerah rawan bencana geologi. Selain gempa, potensi bencana geologi lainnya yang rawan terjadi yaitu tanah longsor ataupun gerakan tanah.

Plt Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhamad Wafid, menyebut potensi bencana geologi di Kabupaten Cianjur relatif cukup besar. Kondisi itu tak terlepas historis beberapa kali bencana berskala besar terjadi di wilayah tersebut. "Cianjur itu multihazard. Potensinya besar di sini (Cianjur). Tidak hanya gempa bumi, juga sering terjadi longsor atau kita sebut gerakan tanah," kata Wafid kepada wartawan di sela kegiatan focus group discussion (FGD) bertema peningkatan kapasitas kebencanaan geologi di salah satu hotel di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Cianjur, Sabtu (18/11).

Wafid menyebut potensi gerakan tanah di Kabupaten Cianjur ada yang bersifat cepat sebagai dampak gempa bumi. Ada juga yang bersifat melambat atau rayapan (creep). "Itu juga akan merusak bangunan-bangunan yang ada," tuturnya.

Setahun lalu atau pada 21 November 2022, Kabupaten Cianjur diguncang gempa bumi bermagnitudo 5,6. Dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi itu sangat dahsyat. Gempa bumi mengakibatkan ratusan jiwa meninggal dunia. Selain itu, puluhan ribu bangunan

rumah penduduk, bangunan perkantoran, bangunan sekolah, dan lainnya rusak. Setahun pascagempa bumi, penanganannya masih terus berlangsung hingga saat ini.

"Kegiatan ini (FGD) merupakan rangkaian peringatan kita terhadap gempa Cianjur dan multihazard yang terjadi di sini (Cianjur). Sekaligus kita soft launching portal Mitigasi Bencana Geologi (MBG)," ujarnya.

Wafid menuturkan pada momen itu sekaligus juga ingin menyosialisasikan secara substantif serta diskusi dengan para pemangku kebijakan berkaitan dengan kebencanaan geologi. Sejauh ini, katanya, terus dilakukan evaluasi dan identifikasi sesar-sesar yang ada di Cianjur pascagempa bumi beberapa waktu lalu. "Kita evaluasi apakah ada hubungan dengan sesar-sesar lama kemudian teraktifkan kembali dan sebagainya. Itu semuanya terus menerus secara dinamis kita lakukan evaluasi," jelasnya. Wafid berharap masyarakat memahami betul berbagai potensi bencana. Dengan pemahaman itu maka berbagai upaya antisipasi bisa disiapkan sedini mungkin. "Dengan diskusi atau FGD ini maka bisa membangkitkan kembali rasa untuk mengetahui potensi-potensi kebencanaan," pungkasnya. ● **pra**

Marah-marah Selepas Nonton Bola, Edy Rahmayadi Hampir Diamuk Massa

MEDAN (IM)- Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi hampir jadi korban amukan penonton selepas pertandingan Persiraja Banda Aceh dan PSMS di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Sabtu (18/11) malam.

Peristiwa itu berawal dari Edy yang mendatangi Manajemen Persiraja setelah mendapat kabar pemain PSMS dilempari botol. Dia sempat meminta pertanggungjawaban Manajemen Persiraja atas peristiwa itu.

Edy tampak berbicara dengan nada tinggi dengan beberapa orang di bagian depan stadion. "Main bola ya, main bola. Pemain jangan diganggu," tenak Edy selepas pertandingan di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Sejumlah pendukung Persiraja yang saat itu memang sudah berkumpul di

tempat itu, tersulut emosi melihat Edy marah-marah. Mereka pun terlihat terlibat dorong-dorongan sambil meneriakinya ke arah Edy.

Melihat kondisi tidak kondusif, polisi pun langsung mengamankan Edy ke mobilnya untuk segera meninggalkan stadion. Beberapa menit kemudian penonton yang ditentang oleh Manajemen Persiraja meninggalkan stadion satu per satu.

Kekecewaan penonton sampai ada aksi pelemparan botol berawal dari dianulirnya gol Persiraja oleh wasit karena dianggap off-side. Penonton yang melihat potongan video siaran langsung merasa pemain pencetak gol dalam posisi on-side. Kekecewaan penonton diperparah oleh diberikannya kartu merah untuk gelandang Persiraja Muamar. ● **pra**

Sekda Burhanudin Arahkan Jajarannya Kegiatan Sinkronisasi Pelayanan PKKPR



Sekda Burhanudin saat menggelar sinkronisasi pelayanan PKKPR.

BABAKAN MADANG (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin memberikan pengarahan kepada jajarannya terkait sinkronisasi pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kabupaten Bogor.

Arahan tersebut disampaikan pada acara monitoring pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi PKKPR, di Hotel Lorin, Babakan Madang, Kamis (16/11).

Hadir pada acara tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR), beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Sekda Burhanudin mengungkapkan, berkaitan dengan kegiatan monitoring pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi PKKPR itu, ia meminta jajarannya

harus ada keinginan membuat database, di antaranya data semua perizinan yang sudah dikeluarkan.

Ini penting karena wilayah Kabupaten Bogor tidak akan tambah tapi jumlah penduduknya akan bertambah terus.

"Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang mengikuti pertumbuhan penduduk tersebut, seperti kebutuhan sandang pangan dan papan serta kebutuhan lainnya," tegasnya.

Database tersebut, lanjut Burhanudin, akan menjadi dasar Pemkab Bogor dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran. Selanjutnya, kegiatan monitoring ini sangatlah penting untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi di antara stakeholder terkait.

"Saya juga mengingatkan, tugas utama kita sebagai pemerintah adalah melayani, memfasilitasi, dan mengurus masyarakat, utamanya yang hidupnya kurang beruntung. Selanjutnya, di akhir periode RPJMD 2018-2023 mari kita pertajam kinerja untuk melayani masyarakat Kabupaten Bogor," tandas Sekda Burhanudin. ● **gio**

8 | Nusantara



PEMECAHAN REKOR ORI PAGELARAN ANGKLUNG

Sejumlah peserta mengikuti pemekahan rekor Original Rekor Indonesia (ORI) pagelaran angklung dengan lagu daerah terbanyak yang dimainkan lintas generasi di lapangan softball GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jabar, Minggu (19/11) dengan diikuti 768 peserta yang membawakan 16 lagu daerah.

Pemkab Karawang Permudah Perizinan untuk Tingkatkan Investasi

Tahun ini, target investasi di Karawang cukup tinggi. Jadi harus ada upaya untuk merealisasikan target itu. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun ini menargetkan investasi di Karawang sebesar Rp40 triliun. kata Pelaksana Tugas Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.

KARAWANG (IM)- Pelaksana Tugas Bupati

Karawang, Aep Syaepuloh menyebutkan bahwa saat

ini Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mempermudah proses perizinan untuk mendukung peningkatan realisasi investasi.

"Pada tahun ini, target investasi di Karawang cukup tinggi. Jadi harus ada upaya untuk merealisasikan target itu," kata Aep, di Karawang, Minggu (19/11).

Ia menyebutkan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun ini menargetkan investasi di Karawang sebesar Rp40

triliun.

Disebutkan, sampai triwulan III 2023 realisasi investasi di Karawang telah mencapai Rp35 triliun.

Di antara upaya untuk mencapai target investasi yang telah ditentukan itu ialah dengan mempermudah proses perizinan di Karawang. Bahkan pihaknya juga mempersilakan pelaku usaha melapor jika dibuat repot dalam mengurus perizinan di Karawang.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, Eka Sanatha mengatakan bahwa saat ini Karawang memiliki infrastruktur paling lengkap untuk menunjang investasi.

Jika melihat penunjang infrastruktur yang ada, katanya, Karawang ini memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta yang jaraknya 90 kilometer, selain itu rencana Bandara Soeta II yang bakal dibangun di Karawang. ● **pra**

Angka Suara Tidak Sah di KBB Masih Tinggi

NGAMPRAH (IM)- Masih tingginya angka suara yang tidak sah dalam pesta demokrasi atau Pemilu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi catatan penting penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB.

Kondisi tersebut tercemin pada Pemilu 2019 di

mana KPU KBB mencatat adanya 11 persen surat suara yang dinyatakan tidak sah dalam Pemilu Legislatif (Pileg).

Meski begitu, tingginya angka suara tidak sah tak hanya terjadi di KBB. Bahkan, secara nasional kasus serupa juga terus mengalami peningkatan dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya.

Berdasarkan data Perkum-

pulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 1999 jumlah suara tidak sah secara nasional baru mencapai 3,4 persen, tahun 2004 sebesar 8,8 persen, 2009 sebesar 14,4 persen, 2014 sebesar 10,6 persen, hingga meroket tajam tahun 2019 sebesar 11,12 persen atau setara 17 juta suara.

"Di KBB memang cukup

tinggi. Bahkan, pada Pileg tahun 2019 di Bandung Barat angka surat suara tidak sah sampai 11 persen," kata Ketua KPU KBB, Rifqi Ahmad Sulaeman belum lama ini.

Menurut Ripqi, faktor penyebab tingginya suara sah pada perhelatan Pemilu di KBB lantaran masyarakat belum paham terkait tata cara

pencoblosan dengan banyaknya surat suara mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ditambah lagi surat suara anggota DPR RI, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten/kota. ● **pra**

Sekda Serious Bahas Angkutan Tambang di Kabupaten Bogor

BOGOR (IM)- Untuk memantapkan persiapan jelang dan mitigasi operasional jam angkutan khusus tambang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin bersama jajaran Pemkab Bogor menggelar Rapat Pembahasan Jam Operasional Angkutan Tambang di Kabupaten Bogor, di Serbaguna I Setda, Jumat (17/11).

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin akan menerapkan jam operasional angkutan khusus tambang dengan beberapa persiapan yakni, pertama Revisi Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan

Angkutan Barang Khusus Tambang pada Wilayah Kabupaten Bogor.

Ketentuannya akan selesai November ini. Setelah itu akan dilakukan sosialisasi baik kepada pemilik quarry, transporter, maupun kepada masyarakat.

Kemudian pembangunan portal tahap pertama dilaksanakan di Jalan Mohammad Toha tepatnya di depan Puskesmas Kecamatan Parung Panjang yang diperkirakan selesai pada hari Rabu 30 November 2023. Untuk itu diperlukan petugas penjaga portal apabila portal sudah dibangun.

"Alhamdulillah Camat, Kapolsek, dan Danramil Kecamatan Parung Pan-

jang sudah memfasilitasi pernyataan dukungan masyarakat untuk pembangunan portal pada, 20 November 2023 lalu," ungkap Burhanudin.

Selain itu juga dibahas beberapa hal lain yakni, berkaitan dengan perlintasan palang pintu kereta api di wilayah Kecamatan Parung Panjang termasuk memberdayakan masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan Calon Penjaga Perlintasan Kereta Api.

Salah satunya pembangunan kantor kecamatan, pendirian rumah sakit atau klinik 24 jam, pembangunan alun-alun kecamatan, pembangunan stadion mini dan pembangunan palang pintu. ● **gio**



Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin saat membahas jam angkutan tambang di wilayah Kabupaten Bogor Bersama jajaran Pemkab.

8 Rumah Rusak Berat Akibat Hujan dan Angin Kencang

BOGOR (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 12 kejadian bencana akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (18/11).

"Total bencana yang terlapor 12 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Theofilo Patrocino Freitas, Minggu (19/11).

Adapun rinciannya yakni 9 kejadian pohon tumbang, 1 bangunan ambruk, 1 atap terbawa angin dan 1 longsor. Bencana tersebut tersebar di beberapa titik di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Tengah.

"Dampak bencana 7 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan dengan 8 KK/28 jiwa," jelasnya.

Berikut rincian 12 bencana yang terjadi di Kota Bogor pada Sabtu 18 November 2023 :

1. Di wilayah Kecamatan Tanah Sareal
 1. Di wilayah Jalan Kasintu, RT. 05 / RW. 05, Kelurahan Tanah Sareal (selesai assessment)
 1. Di wilayah Jalan Ahmad Yani, Pasar Jam-bu Dua, RT. 01 / RW. 06, Kelurahan Tanah Sareal (selesai assessment)
1. Di wilayah Kecamatan Bogor Tengah
 1. Di wilayah Tanah longsor
 1. Di wilayah Kampung Mantarena, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Panaragan (selesai assessment).
1. Di wilayah Kaum

Sari, RT. 03 / RW. 05, Kelurahan Cibuluh (selesai assessment)

2. Di wilayah Jalan Jakatawung, Indraprasta, RT. 05 / RW. 15, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

3. Di wilayah Jalan Bima 3, No. 4, RT. 06 / RW. 15, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

4. Di wilayah Jalan Srikandi Raya, Depan Lapangan Kresna, RT. 04 / RW. 15, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

5. Di wilayah Jalan Kresna Raya, No. 14, RUMAH KITA Playgroup & Child Care, RT. 04 / RW. 16, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

6. Di wilayah Harkat, RT. 03 / RW. 03, Kelurahan Cimahpar (selesai assessment)

7. Di wilayah Jalan Astrajingga, Perumahan Indraprasta, No. 17, RT. 04 / RW. 16, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

8. Di wilayah SDN Kawung Luwuk, RT. 04 / RW. 06, Kelurahan Bantar Jati (selesai assessment)

1. Di wilayah Jalan Kasintu, RT. 05 / RW. 05, Kelurahan Tanah Sareal (selesai assessment)